

		Nomor SOP Tanggal Pemudatan Tanggal Revisi Tanggal Pengesahan Dilakukan Oleh 	Nomor SOP Tanggal Pemudatan 02-Jan-25 Plt. KEPALA BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN IDIKURNIADE, S.I.P., MM NIP. 197409081999011001
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN PANGANDARAN	Dasar Hukum : 1. Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara 2. Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 Tentang Perbedaharaan Negara 3. Undang-Undang No. 15 Tahun 2004 Tentang Pemerkasaan Dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara 4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah Keterkaitan : 1. Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara 2. Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 Tentang Perbedaharaan Negara 3. Undang-Undang No. 15 Tahun 2004 Tentang Pemerkasaan Dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara 4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah Peringatan : Apabila Koordinasi dana bagi hasil pusat dan dana bagi hasil provinsi tidak dilaksanakan maka tidak dapat mengstahu besarnya perkiraaan alokasi maupun tataapan alokasi serta tidak dapat memperkirakan secara akurat perhitungan rencana pendapatan setiap tahunnya	Kualifikasi Pelaksanaan : 1. Memahami tugas pokok dan fungsi Subbid Perbendaharaan 2. Menguasai pengoperasian komputer dan internet	Koordinasi DANA BAGI HASIL PUSAT DAN DANA BAGI HASIL PROVINSI Peralatan/Perlengkapan: 1. Internet ; 2. Printer, Scanner ; 3. Komputer/laptop ; 4. ATK
Pencatatan dan Pendataan : Disimpan sebagai data elektronik dan manual	Peringatan : Apabila Koordinasi dana bagi hasil pusat dan dana bagi hasil provinsi tidak dilaksanakan maka tidak dapat mengstahu besarnya perkiraaan alokasi maupun tataapan alokasi serta tidak dapat memperkirakan secara akurat perhitungan rencana pendapatan setiap tahunnya	Pencatatan dan Pendataan : Disimpan sebagai data elektronik dan manual	

SOP KOORDINASI DANA BAGI HASIL PUSAT DAN DANA BAGI HASIL PROVINSI



